



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Lombok, pada tanggal 19 November 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama Ekonomi (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Economic Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama Ekonomi (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Economic Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 November 2009 di Lombok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 80



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
TENTANG
KERJASAMA EKONOMI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Mengakui bahwa keanggotaan Republik Bulgaria dalam UE dan kewajiban Republik Bulgaria sebagai konsekuensinya mensyaratkan perbaikan dan penjelasan lebih lanjut kontrak dan dasar hukum hubungan ekonomi bilateral,

Menegaskan keinginan mereka untuk mengembangkan dampak positif hubungan ekonomi tradisional mereka,

Menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dalam menemukan alat-alat dan cara-cara untuk memperkuat dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan,

Mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berasal dari Persetujuan Akses yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2005 antara Masyarakat Eropa dan Negara-negara Anggotanya, di satu sisi, dan Republik Bulgaria di sisi lain,

Mempercayai bahwa Akses Republik Bulgaria ke dalam Uni Eropa akan memberikan kesempatan-kesempatan baru untuk memperluas kerjasama ekonomi bilateral,

Meyakini bahwa Persetujuan ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan hubungan ekonomi antara mereka dalam kenyataan yang baru dan secara khusus untuk memajukan kerjasama perdagangan, ekonomi, teknik, dan teknologi yang saling menguntungkan,

Sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Para Pihak akan memberikan kontribusi untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Pasal 2

Para Pihak akan melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kerjasama bilateral mereka secara luas, khususnya di bidang-bidang yang tercantum pada Pasal 4 dari Persetujuan ini.

Pasal 3

Para Pihak akan mengembangkan dan memperluas kerjasama ekonomi mereka melalui pelaksanaan tindakan-tindakan yang tercantum dalam Pasal 5 dari Persetujuan ini.

BAB II BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

Bidang-bidang dari kerjasama ekonomi ini akan meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Industri:
 - Peralatan berat;
 - Metalurgi (besi dan non-besi);
 - Mesin pengolahan makanan;
 - Elektronik dan mesin-mesin listrik;
 - Petrokimia dan Penyulingan minyak;
 - Industri kreatif;
 - Pembangunan kapasitas sumber daya manusia bagi industri;
2. Pertanian:
 - Produksi panen dan pembiakan bibit ternak;
 - Industri makanan;
3. Kehutanan;
4. Sektor energi dan mineral;
5. Penelitian dan pengembangan;
6. Konstruksi dan industri bangunan;
7. Telekomunikasi, komputer dan informatika;
8. Perhubungan dan logistik;
9. Perlindungan lingkungan hidup;
10. Pariwisata;
11. Penanaman modal;
12. Kerjasama UKM;

13. Kesehatan;
14. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 5

Dengan maksud untuk memperluas dan mengintensifkan kerjasama ekonomi, Para Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang mencakup:

1. Memperkuat kerjasama ekonomi dari institusi-institusi pemerintah, organisasi-organisasi profesional dan kalangan bisnis, kamar-kamar dagang dan asosiasi-asosiasi, badan-badan wilayah dan lokal, termasuk pertukaran informasi ekonomi, berdasarkan kepentingan bersama, serta kunjungan-kunjungan timbal balik wakil-wakil institusi-institusi dan bisnis dari Para Pihak;
2. Menyediakan insentif untuk membentuk kontak-kontak bisnis baru dan memajukan kontak-kontak bisnis yang telah ada, mempromosikan kontak-kontak bersama dan kunjungan-kunjungan perorangan dan para pengusaha;
3. Pertukaran informasi bisnis, keikutsertaan dalam pameran-pameran internasional, menyediakan bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bagi wakil-wakil bisnis, seminar-seminar, konferensi, dan simposium;
4. Memberikan kontribusi bagi peran yang lebih luas dari bisnis usaha kecil dan menengah dalam hubungan ekonomi bilateral;
5. Kerjasama di bidang pemasaran, jasa-jasa konsultasi dan ahli di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama;
6. Mengembangkan hubungan dan kerjasama institusi-institusi keuangan dan perbankan yang lebih erat;
7. Menyediakan bantuan bagi pengembangan kegiatan penanaman modal bilateral;
8. Menyediakan bantuan bagi pembukaan perwakilan-perwakilan dan cabang-cabang perusahaan dari Para Pihak;
9. Mempromosikan kerjasama internasional;
10. Memajukan kerjasama mengenai pasar-pasar negara ketiga;
11. Informasi, pertukaran program-program dan proyek-proyek, mendorong keterlibatan para pengusaha dalam pelaksanaannya.

BAB III BADAN-BADAN PELAKSANA

Pasal 6

Bagi masing-masing Pihak institusi-institusi berikut ini akan mengawasi pelaksanaan Persetujuan ini:

- a) Untuk Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b) Untuk Republik Bulgaria, Kementerian Ekonomi, Energi dan Pariwisata.

BAB IV **KOMISI BERSAMA KERJASAMA EKONOMI**

Pasal 7

1. Komisi Bersama Ekonomi (selanjutnya disebut "Komisi Bersama") dengan ini dibentuk oleh Para Pihak dengan maksud untuk melakukan koordinasi erat dan konsultasi antara Para Pihak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari Persetujuan ini. Komisi Bersama akan melakukan pertemuan secara rutin pada tingkat Pejabat Senior dan pertemuan-pertemuannya diselenggarakan bergantian di Republik Indonesia dan di Republik Bulgaria, kecuali disepakati lain dalam kasus-kasus khusus.
2. Komisi Bersama dapat membentuk sub-sub komite atau kelompok-kelompok kerja jika dipandang perlu. Komisi Bersama dapat melibatkan wakil-wakil organisasi-organisasi dan institusi-institusi yang relevan serta wakil-wakil bisnis tingkat tinggi dari negara-negara Para Pihak, sebagaimana lazimnya, untuk membantu pelaksanaan Persetujuan ini. Hal ini dapat mencakup keikutsertaan sektor swasta dalam kelompok-kelompok kerja khusus.
3. Kecuali Komisi Bersama memutuskan lain, para Ketua Bersama, yang akan terdiri dari wakil-wakil dari pihak Indonesia dan pihak Bulgaria, akan menyampaikan kepada Komisi Bersama, pada setiap pertemuan, laporan pertemuan-pertemuan rutinnnya yang mencakup kegiatan-kegiatan sub-komite atau kelompok-kelompok kerja yang dibentuk melalui Persetujuan ini.

Pasal 8

Dalam kerangka hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing Negara dari Para Pihak, topik-topik berikut secara khusus menjadi landasan kegiatan-kegiatan Komisi Bersama:

1. Pertukaran pendapat tentang masalah-masalah makroekonomi di kedua Negara;
2. Masalah-masalah yang timbul dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis dan penanaman modal;
3. Promosi kerjasama ekonomi, industri dan pembangunan antara individu dan badan-badan hukum dari negara-negara Para Pihak;
4. Topik-topik lain yang relevan yang disepakati oleh Para Pihak

Pasal 9

1. Komisi bersama akan melakukan pertemuan pada waktu yang disepakati antara Para Pihak melalui saluran-saluran diplomatik, secara bergantian di Republik Indonesia dan di Republik Bulgaria.
2. Para Ketua Bersama akan menyepakati permintaan dan agenda dari tiap-tiap pertemuan Komisi Bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam agenda awal dapat dibahas pada saat pertemuan Komisi Bersama atas persetujuan para Ketua Bersama.

4. Pertemuan luar biasa Komisi Bersama atau para Ketua Bersama-nya dapat dilakukan atas usulan dari salah satu Para Pihak.
5. Para penasihat dan ahli dapat diundang pada pertemuan-pertemuan Komisi Bersama.
6. Bahasa kerja Komisi Bersama adalah Bahasa Inggris.
7. Catatan-catatan pertemuan akan dibuat pada setiap pertemuan dan pada pembahasan-pembahasan dalam pertemuan yang akan disusun dalam Bahasa Inggris.
8. Dalam jangka waktu antara pertemuan-pertemuan para Ketua Bersama dari Komisi Bersama, atau para sekretaris atas suatu arahan oleh para Ketua Bersama, akan membahas secara operasional masalah-masalah terkait kerja Komisi Bersama.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak akibat persetujuan-persetujuan internasional lainnya dimana Republik Indonesia dan Republik Bulgaria menjadi pihak dan/atau dari keanggotaan Republik Bulgaria dalam UE.

Pasal 11

Tambahan-tambahan dan protokol-protokol Persetujuan ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 12

Para Pihak akan saling memberikan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan tentang Aspek-aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya tentang kekayaan intelektual, dimana kedua Pihak menjadi pihak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Para Pihak akan menyelesaikan melalui negosiasi setiap perselisihan yang mungkin timbul antara mereka mengenai pelaksanaan dan/atau penafsiran atas Persetujuan ini.

Pasal 14

Perubahan pada Persetujuan ini akan dibuat melalui persetujuan bersama antara Para Pihak yang dilakukan dalam protokol-protokol tersendiri bagi setiap perubahan.

Pasal 15

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya nota pemberitahuan kedua dimana Para Pihak memberitahukan bahwa prosedur Internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali kapanpun salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai niatnya untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran Persetujuan ini.
3. Masing-masing Pihak dari Persetujuan ini dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Penghentian tersebut mulai berlaku pada hari pertama bulan keempat setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lainnya.
4. Pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bulgaria Tentang Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang ditandatangani di Sofia pada tanggal 12 Oktober 1990, berakhir.
5. Penghentian Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari jangka waktu program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini hingga terselesaikannya program-program dan proyek-proyek tersebut kecuali Para Pihak memutuskan lain.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Lombok, Indonesia pada hari kesembilan belas bulan November tahun dua ribu sembilan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Retno L.P. Marsudi
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa
Departemen Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK BULGARIA**



Evgeni Angelov
Wakil Menteri
Ekonomi, Energi, dan Pariwisata



DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

No. D/00372/02/2010/39

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the Embassy of Republic of Bulgaria in Jakarta and, with reference to Embassy's note no. BEJ 1035/2010 dated 12 February 2010, has the honour to inform the latter that the improvements of the language of the Indonesian-language document of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Economic Cooperation, signed in Lombok on 19 November 2009, does not require any amendments to the English-language and Bulgarian-language documents of the said Agreement.

The Ministry has further the honour to kindly request the Bulgarian Government's cordial cooperation in giving written consent to the above mentioned improvement to the Indonesian-language document of the Agreement at its earliest convenience to speed up the ratification process on the Indonesian Side.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Republic of Bulgaria in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 15 February 2010

Embassy of the Republic of Bulgaria
Jakarta



Terjemahan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormat kepada Kedutaan Besar Republik Bulgaria di Jakarta dan, merujuk nota Kedutaan no. BEJ 1035/2010 tertanggal 12 Februari 2010, dengan hormat menginformasikan bahwa perbaikan bahasa yang dilakukan terhadap dokumen Bahasa Indonesia Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi, ditandatangani di Lombok pada 19 November 2009, tidak memerlukan amandemen terhadap dokumen Bahasa Inggris dan Bahasa Bulgaria persetujuan dimaksud.

Kementerian Luar Negeri selanjutnya meminta dengan hormat kerja sama Pemerintah Bulgaria untuk memberikan persetujuan tertulis terhadap perbaikan dokumen Bahasa Indonesia persetujuan tersebut di atas pada kesempatan pertama untuk mempercepat proses pengesahan yang dilakukan pihak Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kedutaan Besar Republik Bulgaria di Jakarta.

Jakarta, 15 Februari 2010

Kedutaan Besar Republik Bulgaria
J a k a r t a



REPUBLIC OF BULGARIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

№ 54-27-10

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria presents its compliments to the Embassy of the Republic of Indonesia in Sofia and with reference to the latter's Note No. 46/11/10/04 dated February 4th, 2010, as well as Notes No. D/00321/02/2010/39 of February 12th, 2010 and No.D/00555/03/2010/39 of March 15th, 2010 of the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia to the Embassy of the Republic of Bulgaria in Jakarta, has the honour to communicate the following:

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria hereby expresses the Bulgarian side's consent to the *revised* Indonesian language version of the Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Indonesia, signed in Lombok on November 19th, 2009.

At the same time the Bulgarian side would like to once again point out that all corrections in the Indonesian text of the Agreement, being solely grammatical in nature, *will absolutely not affect the substance of its Bulgarian and English texts* as stated in No. D/00321/02/2010/39 of February 12th, 2010 of the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Referring to its Note No. 54-27-10 dated February 16th, 2010 and in compliance with Article 15 /1/ of the above Agreement the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria would be most grateful if the esteemed Embassy could inform it of the completion by the Indonesian side of all necessary procedures for the entry into force of the Agreement at its earliest convenience.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Indonesia in Sofia the assurances of its highest consideration. D.P.

Sofia, 17 March 2010

TO
THE EMBASSY OF
THE REPUBLIC OF
INDONESIA
SOFIA



3/3

03872 FRM.max



REPUBLIK INDONESIA

Rektifikasi

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
MENGENAI
KERJA SAMA EKONOMI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria (selanjutnya disebut "Para Pihak")

Mengakui bahwa keanggotaan Republik Bulgaria dalam UE dan kewajiban Republik Bulgaria sebagai konskuensinya mensyaratkan peningkatan dan perluasan hubungan ekonomi bilateral yang bersifat kontraktual dan berbasis hukum,

Menegaskan keinginan para Pihak untuk mengembangkan dampak positif hubungan ekonomi yang sudah ada,

Menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam menemukan cara-cara untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan,

Menimbang hak dan kewajiban yang timbul dari Persetujuan Akses yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2005 antara Masyarakat Eropa dan Negara-negara Anggotanya, di satu pihak, dan Republik Bulgaria di pihak lain,

Mempercayai bahwa Akses Republik Bulgaria pada Uni Eropa akan memberikan peluang-peluang baru untuk memperluas kerja sama ekonomi bilateral,

Meyakini bahwa Persetujuan ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan hubungan ekonomi antara para Pihak dalam suasana yang baru dan khususnya untuk memajukan kerja sama perdagangan, ekonomi, teknik, dan teknologi yang saling menguntungkan,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Para Pihak wajib memberikan kontribusi untuk mengembangkan dan memperluas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan

Pasal 2

Para Pihak wajib melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kerja sama bilateral secara luas, khususnya di bidang-bidang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Persetujuan ini

Pasal 3

Para Pihak wajib mengembangkan dan memperluas kerja sama ekonomi melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Persetujuan ini

BAB II BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

Bidang-bidang kerja sama ekonomi ini wajib meliputi tetapi tidak terbatas pada :

1. Industri :
 - Peralatan berat;
 - Metalurgi (besi dan non-besi);
 - Mesin pengolah makanan;
 - Barang-barang elektronik dan mesin-mesin listrik;
 - Petrokimia dan penyulingan minyak;
 - Industri kreatif;
 - Pengembangan sumber daya manusia di bidang industri;
2. Pertanian :
 - Produksi hasil pertanian dan pembiakan bibit ternak;
 - Industri pangan;
3. Kehutanan;
4. Sektor energi dan mineral;
5. Penelitian dan pengembangan;
6. Konstruksi dan industri bangunan;
7. Telekomunikasi, komputerisasi dan informatika;
8. Transportasi dan logistik;
9. Perlindungan lingkungan hidup;
10. Pariwisata;
11. Penanaman Modal;
12. Kerja sama UKM;
13. Kesehatan;
14. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 5

Dengan maksud untuk memperluas dan mengintensifkan kerja sama ekonomi, Para Pihak wajib melakukan kebijakan-kebijakan meliputi :

1. Memperkuat kerja sama ekonomi antara lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi profesional dan kalangan usaha, kamar dagang dan asosiasi-asosiasi, badan-badan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pertukaran informasi ekonomi, yang menjadi kepentingan bersama, serta kunjungan bersama wakil-wakil dari lembaga-lembaga dan pelaku usaha dari Para Pihak;
2. Menyediakan insentif untuk membentuk kontak usaha baru dan meningkatkan yang telah ada, dengan meningkatkan kontak dan kunjungan bersama dari pihak swasta dan para pengusaha;
3. Pertukaran informasi usaha, keikutsertaan dalam pameran internasional, dengan memberikan bantuan bagi penyelenggaraan kegiatan untuk para wakil usaha, seminar, konferensi, symposium;
4. Memberikan kontribusi pada peningkatan peran untuk usaha kecil dan menengah dalam hubungan ekonomi bilateral;
5. Kerja sama di bidang jasa pemasaran, konsultasi dan tenaga ahli di bidang yang menjadi kepentingan bersama;
6. Mengembangkan hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara lembaga-lembaga keuangan dan perbankan;
7. Menyediakan bantuan bagi pengembangan kegiatan penanaman modal bilateral;
8. Menyediakan bantuan untuk pembukaan kantor-kantor perwakilan dan cabang-cabang perusahaan dari Para Pihak;
9. Meningkatkan kerja sama internasional;
10. Memajukan kerja sama di pasar-pasar negara ketiga;
11. Informasi, pertukaran program-program dan proyek-proyek, dengan mendorong keterlibatan para pengusaha dalam pelaksanaannya

BAB III BADAN PELAKSANA

Pasal 6

Untuk masing-masing Pihak lembaga-lembaga berikut ini wajib mengawasi pelaksanaan Persetujuan ini :

- a). Untuk Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b). Untuk Republik Bulgaria, Kementerian Ekonomi, Energi dan Pariwisata

BAB IV

KOMITE BERSAMA BIDANG KERJA SAMA EKONOMI

Pasal 7

1. Komite Ekonomi Bersama (selanjutnya disebut "Komite Bersama") dengan ini dibentuk oleh para Pihak untuk menciptakan koordinasi dan konsultasi yang erat antara para Pihak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari Persetujuan ini. Komite Bersama wajib bertemu secara rutin di tingkat Pejabat Senior dan pertemuan-pertemuannya seharusnya diselenggarakan secara bergantian di Republik Indonesia dan di Republik Bulgaria, kecuali disepakati sebaliknya dalam kasus-kasus tertentu.
2. Komite Bersama dapat membentuk sub-subkomite atau kelompok-kelompok kerja apabila dianggap perlu. Komite Bersama dapat melibatkan wakil-wakil dari organisasi dan lembaga yang relevan serta wakil-wakil usaha tingkat tinggi dari Negara-negara para Pihak, yang sesuai, untuk membantu pelaksanaan Persetujuan ini. Hal ini dapat meliputi keikutsertaan sektor swasta dalam kelompok-kelompok kerja khusus.
3. Kecuali Komite Bersama memutuskan sebaliknya, Ketua Bersama, yang wajib terdiri dari wakil-wakil dari pihak Indonesia dan pihak Bulgaria, wajib memaparkan dalam masing-masing laporan pertemuan rutinnya yang mencakup kegiatan-kegiatan sub-subkomite atau kelompok-kelompok kerja yang dapat dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 8

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara para Pihak, topik-topik tertentu berikut ini seharusnya membentuk dasar bagi kegiatan-kegiatan Komite Bersama :

- a). Pertukaran pendapat mengenai isu-isu ekonomi makro di kedua negara;
- b). Isu-isu yang timbul sehubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha dan penanaman modal;
- c). Peningkatan kerja sama ekonomi, industrial dan pembangunan antara orang perseorangan dan badan-badan hukum dari negara para Pihak;
- d). Topik-topik relevan lainnya yang disepakati bersama oleh para Pihak

Pasal 9

1. Komite Bersama wajib bertemu pada saat, sebagaimana disepakati oleh kedua Pihak melalui saluran diplomatik, secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik Bulgaria
2. Ketua Bersama wajib menyepakati permintaan dan agenda masing-masing pertemuan Komite Bersama tidak lebih dari 1 (satu) bulan sebelumnya
3. Hal-hal yang belum disepakati secara jelas pada agenda pendahuluan dimaksud dapat dibahas pada pertemuan-pertemuan Komite Bersama berdasarkan kesepakatan Ketua Bersama
4. Suatu pertemuan luar biasa dari Komite Bersama atau Ketua Bersama dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari setiap Ketua Bersama dimaksud
5. Para penasihat dan tenaga ahli dapat diundang pada pertemuan-pertemuan Komite Bersama
6. Bahasa kerja Komite Bersama wajib dalam Bahasa Inggris
7. Catatan-catatan wajib dibuat dalam setiap pertemuan dan pembahasan yang diselenggarakan wajib dituangkan dalam Bahasa Inggris

8. Dalam jangka waktu antara pertemuan-pertemuan Ketua Bersama dari Komite Bersama, atau sekretaris-sekretaris berdasarkan arahan Ketua Bersama dimaksud, wajib membahas mengenai isu-isu dasar operasional berkenaan dengan pekerjaan Komite Bersama

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Persetujuan ini wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban para Pihak yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya di mana Republik Indonesia dan Republik Bulgaria merupakan para pihak dan/atau dari keanggotaan Republik Bulgaria dalam UE.

Pasal 11

Lampiran-lampiran dan protokol-protokol Persetujuan ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripadanya

Pasal 12

Para Pihak wajib memberikan satu sama lain perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan mengenai Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual Yang Terkait Dengan Perdagangan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya berkenaan dengan kekayaan intelektual, di mana para Pihak menjadi pihak.

BAB VI KETENTUAN AKHIR

Pasal 13

Para Pihak wajib menyelesaikan dengan cara perundingan setiap sengketa yang dapat timbul antara para Pihak berkenaan dengan pelaksanaan dan/atau penafsiran atas Persetujuan ini.

Pasal 14

Perubahan pada Persetujuan ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para Pihak yang dilakukan dalam protokol-protokol tersendiri untuk masing-masing perubahan.

Pasal 15

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota kedua di mana para Pihak saling memberitahukan bahwa prosedur internal yang dipersyaratkan untuk mulai berlakunya Persetujuan telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan wajib secara otomatis diperpanjang sesudahnya untuk jangka waktu yang sama, kecuali setiap saat salah satu Pihak menyampaikan kepada Pihak lainnya suatu pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 (enam) bulan sebelum pengakhirannya.

3. Masing-masing Pihak pada Persetujuan ini dapat mengakhiri Persetujuan ini, dengan cara melalui suatu pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Pengakhiran dimaksud wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan keempat berikutnya pada tanggal di mana pemberitahuan dimaksud telah diterima oleh Pihak lainnya.
4. Sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bulgaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik, yang ditandatangani di Sofia pada tanggal 12 Oktober 1990, wajib diakhiri.
5. Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari setiap program dan proyek yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sampai penyelesaian program-program dan proyek-proyek tersebut kecuali para Pihak memutuskan sebaliknya.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan, yang diberi kuasa kepadanya oleh masing-masing pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT rangkap dua di Lombok, Indonesia pada tanggal sembilan belas November tahun dua ribu sembilan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
BULGARIA**

TTD

Retno L.P. Marsudi
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa
Departemen Luar Negeri

TTD

Evgeni Angelov
Wakil Menteri Ekonomi, Energi, dan
Pariwisata



REPUBLIK INDONESIA

**СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
И
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ПРЕАМБЮЛ

Правителството на Република Индонезия и правителството на Република България (наричани по-нататък "Договарящите се страни"),

Съзнавайки, че пълноправното членство на Република България в Европейския съюз и произтичащите от това за Република България задължения изискват по-нататъшното подобряване и усъвършенстване на договорно-правната база на двустранните икономически взаимоотношения,

Потвърждавайки твърдото си намерение да развиват позитивните страни на традиционните си икономически взаимоотношения,

Изразявайки своята готовност в търсенето на средства и начини за укрепването и развитието на взаимноизгодното сътрудничество,

Имайки предвид правата и задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване, подписан на 25 април 2005 г. между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна,

Изразявайки убеждението, че присъединяването на Република България към Европейския съюз ще предостави нови възможности за разширяването на двустранното икономическо сътрудничество,

Уверени, че това Споразумение ще допринесе за развитие на икономическите връзки между тях в новите условия и в частност за активизиране на взаимноизгодното търговско-икономическо, техническо и технологично сътрудничество,

Съобразявайки се с преобладаващите закони и разпоредби в своите страни,

се договориха, както следва:

**РАЗДЕЛ I
ЦЕЛИ**

Член 1

Договарящите се страни ще съдействат за развитието и разширяването на взаимноизгодното си икономическо сътрудничество.

Член 2

Договарящите се страни ще полагат усилия за осъществяване на широко двустранно сътрудничество преди всичко в областите, посочени в член 4 на това Споразумение.

Член 3

Договарящите се страни ще развиват и разширяват икономическото си сътрудничество чрез прилагане на мерките, посочени в член 5 от това Споразумение.

РАЗДЕЛ II ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 4

Областите на икономическо сътрудничество следва да включват, но не и да са ограничени само с:

1. Промисленост:
 - оборудване за тежката промисленост;
 - металургия (черна и цветна);
 - хранително-вкусова промисленост;
 - електроника и електрически съоръжения;
 - химическа и нефтопреработвателна промисленост;
 - творческа индустрия;
 - индустрия: изграждане на капацитет на човешкия потенциал.
2. Селско стопанство:
 - растениевъдство и животновъдство;
 - хранително-вкусова промисленост;
3. Горско стопанство;
4. Енергетика и ползвани изкопаеми;
5. Научно-изследователска и развойна дейност;
6. Строителство и строителна промисленост;
7. Телекомуникации, изчислителна техника и информатика;
8. Транспорт и логистика;
9. Опазване на околната среда;
10. Туризм;
11. Насърчаване на инвестициите;
12. Сътрудничество между малки и средни предприятия;
13. Здравоспазване;
14. Наука и технологии.

Член 5

С оглед разширяване и интензифициране на икономическото сътрудничество, Договарящите се страни ще предприемат мерки, които ще включват:

1. Засилване на икономическото сътрудничество на правителствените институции, професионални организации и бизнес среди, търговски палати и асоциации, регионални и местни организации, включително и размяната на икономическа информация от взаимен интерес, както и взаимни визити на представители на институциите и бизнеса на Договарящите се страни;

2. Осигуряване на стимули за установяване на нови и стимулиране на съществуващите бизнес контакти, насърчаване на взаимните контакти и визити на частни лица и предприемачи;

3. Размяна на бизнес информация, участие в международни панаири и изложения, осигуряване на съдействие за организирането на събития за представителите на бизнеса, семинари, конференции, симпозиуми;

4. Допринасяне за увеличаване на ролята на малкия и средния бизнес в двустранните икономически отношения;

5. Сътрудничество в областта на маркетинга, консултантските и експертните услуги в области от взаимен интерес;

6. Развиване на по-близки отношения и сътрудничество между банкови и финансови институции;

7. Осигуряване на сътрудничество за развитието на двустранни инвестиционни дейности;

8. Осигуряване на сътрудничество за откриването на представителства и клонове на компании на Договарящите се страни;

9. Поощряване на международното сътрудничество;

10. Поощряване на сътрудничеството на пазарите на трети страни;

11. Размяна на информация за програми и проекти, поощряване участието на предприемачи при тяхното прилагане.

РАЗДЕЛ III ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ

Член 6

Всяка една от Договарящите се страни трябва да контролира изпълнението на настоящото споразумение.

а/ От страна на Република Индонезия, координиращ орган е Министерство на икономическите отношения.

б/ От страна на Република България координиращ орган е Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

РАЗДЕЛ IV СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 7

1. Смесената комисия за икономическо сътрудничество (наричана по-нататък „Смесена комисия“) е създадена от Договарящите се страни с цел постигане на по-тясно сътрудничество и консултация между страните за успешното изпълнение на целите на това споразумение. Смесената комисия трябва да се организира и провежда на определени интервали от време, на официално ниво, на редуващ се принцип в Република Индонезия и в Република България, в случай че няма други договорености по отделни случаи.

2. Смесената комисия може да създаде подкомисии или работни групи, ако се прецени че е необходимо. Смесената комисия може да включва представители на съответните организации и институции, както и високопоставени представители на бизнеса от Договарящите се страни, когато е уместно, с цел подпомагане изпълнението на това Споразумение. Това може да включва участие на представители от частния сектор в специализирани работни групи.

3. В случай, че Смесената комисия не е стигнала до друго решение, съпредседателите, включващи представители на индонезийската и на българската страна, трябва да представят на редовните срещи доклади,

В УВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО, долуподписаните, надлежно упълномощени за това от съответните правителства, подписаха това Споразумение.

ИЗГОТВЕНО в Ломбок, Индонезия на 19 ноември 2009 г., в два оригинални екземпляра на индонезийски, български и английски език, като всички текстове са с еднаква автентичност. В случай на различия при тълкуването, английският текст ще се счита за меродавен.

**ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ**



**РЕТНО МАРСУДИ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
ЗА АМЕРИКА И ЕВРОПА
В ДЕПАРТАМЕНТА ЗА
ВЪШНИ ОТНОШЕНИЯ**

**ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**



**ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА**

съдържащи изпълнение на дейностите от подкомисиите или работните групи, създадени в рамките на това Споразумение.

Член 8

В рамките на закона и законовите разпоредби в съответните държави на Договарящите се страни, следните теми в частност трябва да формират основата на дейностите на Смесената комисия.

- а/ обмяна на мнения по макроикономическите въпроси в двете страни;
- б/ възникнали въпроси във връзка с бизнес и инвестиционни мероприятия;
- в/ насърчаване на икономиката, индустрията и развитие на сътрудничеството между физически и юридически лица на Договарящите се страни.
- г/ други подобни теми, съгласувани между Договарящите се страни.

Член 9

1. Смесената комисия трябва да се провежда по време, съгласувано между Договарящите се страни по дипломатически път, редувайки се в Република Индонезия и в Република България.

2. Съпредседателите трябва да се споразумеят относно свикването и дневния ред на съответната среща на комисията, не по-късно от 1 месец предварително.

3. Въпроси, които не са изрично поставени в предварителния дневен ред за провеждане на Смесената комисия, могат да бъдат дискутирани по време на комисията по договореност между съпредседателите.

4. Извънредна среща на Смесената комисия или на нейните съпредседатели може да бъде свикана по предложение на всеки от съпредседателите.

5. Съветници и експерти могат да бъдат поканени при срещите на Смесената комисия.

6. Работният език на Смесената комисия е английски език.

7. За всяка среща и проведените на нея дискусии ще се води протокол, съставен на английски език.

8. В периода между сесиите, съпредседателите на Смесената комисия, или секретарите под ръководството на съпредседателите, трябва да обсъждат в оперативен план въпроси, отнасящи се до работата на Смесената комисия.

РАЗДЕЛ V ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Настоящото Споразумение не накърнява правата и задълженията на Договарящите се страни, произтичащи от други международни договори, по които Република Индонезия и Република България са страни, както и членството на Република България в ЕС.

Член 11

Приложенията и протоколите към това Споразумение са неразделна част от него.

Член 12

Всяка от Договарящите се страни ще осигури опазване на интелектуалната собственост в съответствие със Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, което е неразделна част от Споразумението за учредяване на Световната търговска организация, както и в съответствие с други международни договори за интелектуалната собственост, по които двете страни са договорни страни.

РАЗДЕЛ VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

В случаите на възникване на разногласия между Договарящите се страни във връзка с прилагането и тълкуването на настоящото Споразумение, те ще се разрешават чрез преговори между Договарящите се страни.

Член 14

По взаимно съгласие между Договарящите се страни в настоящото Споразумение могат да бъдат внесени изменения, които ще бъдат оформяни в отделни протоколи.

Член 15

1. Това Споразумение влиза в сила в деня на получаването на второто уведомление, с което Договарящите се страни си потвърждават, че вътрешните процедури, необходими за влизане в сила на Споразумението, са изпълнени.

2. Това споразумение ще остане в сила за период от 5 (пет) години и ще бъде автоматично продължено впоследствие за същия период, освен ако по всяко време, която и да е Договаряща се страна, предаде на другата писмено известие за своето намерение да прекрати това Споразумение 6 (шест) месеца преди неговото прекратяване.

3. Всяка от Договарящите се страни може да прекрати това Споразумение чрез писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Действието на Споразумението се прекратява от първия ден на четвъртия месец, следващ датата на получаване на уведомлението от другата Договаряща се страна.

4. Считано от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение, Търговската спогодба между правителството на Република Индонезия и правителството на Република България, подписана в Джакарта на 29 януари 2004 г., и Споразумението между правителството на Република Индонезия и правителството на Народна Република България за икономическо и техническо сътрудничество, подписано в София на 12 октомври 1990 г., се прекратяват.

5. Прекратяването на това Споразумение няма да се отрази на валидността и продължителността, на които и да са текущи програми или проекти, сключени съобразно това Споразумение, докато тези програми и проекти не завършат, освен ако Договарящите се страни не решат друго.



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
ON
ECONOMIC COOPERATION**

PREAMBLE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter called "the Contracting Parties"),

Recognizing that the EU membership of the Republic of Bulgaria and the obligation of the Republic of Bulgaria stemming therefrom require further improvement and elaboration of the contractual and legal basis of bilateral economic relations,

Confirming their will to develop the positive effect of their traditional economic relations,

Expressing the readiness to co-operate in finding the means and ways for strengthening and developing of the mutually beneficial cooperation,

Considering the rights and obligations deriving from the Accession Agreement signed on April 25, 2005 between the European Communities and their Member States, on the one part, and the Republic of Bulgaria, on the other part,

Believing that Republic of Bulgaria's accession to the European Union will give new opportunities for expanding the bilateral economic cooperation,

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between them in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial trade, economic, technical and technological cooperation,

Pursuant to the prevailing laws and regulation in their respective countries,

Have agreed as follows:

**CHAPTER I
OBJECTIVES**

Article 1

The Contracting Parties shall contribute for developing and expanding their mutually beneficial economic cooperation.

Article 2

The Contracting Parties shall make efforts to develop their bilateral cooperation on a wide basis, in particular in the areas specified in Article 4 of this Agreement.

Article 3

The Contracting Parties shall develop and expand their economic cooperation through implementation of the measures specified in Article 5 of this Agreement.

CHAPTER II AREAS OF COOPERATION

Article 4

The areas of this economic cooperation shall include but not limited to:

1. Industry:
 - Heavy equipment;
 - Metallurgy (ferrous and non-ferrous);
 - Food processing machinery;
 - Electronics and Electrical Machineries;
 - Petrochemical and oil-refinery;
 - Creative industry;
 - Industry Human Resources Capacity Building.
2. Agriculture
 - crop production and stock-breeding;
 - food industry;
3. Forestry;
4. Energy and mineral sector;
5. Research and development;
6. Construction and building industry;
7. Telecommunication, computing and informatics;
8. Transport and logistics;
9. Environment protection;
10. Tourism;
11. Investment;
12. SME cooperation;
13. Health care;
14. Science and technology.

Article 5

With the view to expanding and intensifying the economic cooperation, the Contracting Parties shall undertake measures which shall include:

1. Strengthening the economic cooperation of the government institutions, professional organizations and business circles, chambers and associations, regional and local bodies, including exchange of economic information, of mutual interest, as well as mutual visits of representatives of the institutions and the business of the Contracting Parties;
2. Providing incentives for establishing of new and enhancing existing business contacts, promoting mutual contacts and visits of private persons and entrepreneurs;
3. Business information exchange, participation in international fairs and exhibitions, providing assistance for the organization of events for business representatives, seminars, conferences, symposia;
4. Contributing to an enhanced role of the small and medium-sized business in the bilateral economic relations;
5. Cooperation in the field of marketing, consulting and expert services in the areas of mutual interest;

6. Developing closer relations and cooperation of financial and banking institutions;
7. Providing assistance for the development of bilateral investment activity;
8. Providing assistance for the opening of representations and branches of companies of the Contracting Parties;
9. Promoting international cooperation;
10. Enhancing the cooperation on third countries' markets;
11. Information, exchange on programs and projects, encouraging the involvement of entrepreneurs in their implementation.

CHAPTER III IMPLEMENTING AGENCIES

Article 6

For each Contracting Party the following institutions shall oversee the implementation of this Agreement:

- a) In case of the Republic of Indonesia, the Coordinating Ministry for Economic Affairs;
- b) In case of the Republic of Bulgaria, the Ministry of Economy, Energy and Tourism.

CHAPTER IV JOINT COMMITTEE ON ECONOMIC COOPERATION

Article 7

1. Joint Economic Committee (hereinafter referred to as "Joint Committee") is hereby established by the Contracting Parties with the view to acquiring close coordination and consultation between the Contracting Parties in order to accomplish the objectives of this Agreement. The Joint Committee shall meet at regular intervals at the Senior Official level and its meetings should be held alternately in the Republic of Indonesia and in the Republic of Bulgaria, unless otherwise agreed upon in particular cases.
2. The Joint Committee may establish sub-committees or working groups if deemed necessary. The Joint Committee may involve representatives of relevant organizations and institutions as well as high-ranking business representatives of countries of the Contracting Parties, as appropriate, to assist the implementation of this Agreement. This may include private sector participation in specialized working groups.
3. Unless the Joint Committee otherwise decides, the Co-chairpersons, which shall comprise of representatives of the Indonesian side and the Bulgarian side, shall present to it at each of its regular meetings reports covering the activities of sub-committees or working groups which may be established under this Agreement.

Article 8

Within the framework of laws and regulations in force in the respective countries of the Contracting Parties, the following topics in particular should form the basis of the Joint Committee activities:

- a) exchange of opinions on macroeconomic issues in the two countries;
- b) issues arising in connection with business and investment activities;
- c) promotion of economic, industrial and development cooperation between natural and legal persons of countries of the Contracting Parties;
- d) other relevant topics agreed upon by the Contracting Parties

Article 9

1. The Joint Committee shall meet at time, agreed between the two Contracting Parties through diplomatic channels, alternately in the Republic of Indonesia and in the Republic of Bulgaria.
2. The Co-chairpersons shall agree on the calling and the agenda of the respective meeting of the Joint Committee no later than 1 (one) month in advance.
3. Matters which have not been explicitly placed on the preliminary agenda may be discussed at the meetings of the Joint Committee by an agreement of the Co-chairpersons.
4. An extraordinary meeting of the Joint Committee or of its Co-chairpersons may be convened on a proposal by any of the Co-chairpersons.
5. Advisors and experts may be invited at the meetings of the Joint Committee.
6. The working language of the Joint Committee shall be English.
7. Minutes shall be taken of every meeting and of the discussions held thereat which shall be drawn up in English language.
8. In the period between meetings the Co-chairpersons of the Joint Committee, or the secretaries on a direction by the Co-chairpersons, shall discuss on an operational basis issues concerning the work of the Joint Committee.

CHAPTER V OTHER PROVISIONS

Article 10

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting Parties stemming from other international agreements to which the Republic of Indonesia and the Republic of Bulgaria are parties and/or out of the membership of the Republic of Bulgaria to the EU.

Article 11

The annexes and protocols to this Agreement shall be an integral part hereof.

Article 12

The Contracting parties shall provide each other intellectual property protection in accordance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, which forms an integral part of the World Trade Organization (WTO) establishing Agreement, as well as other international treaties concerning intellectual property, to which both Parties are contracting parties.

CHAPTER VI FINAL PROVISIONS

Article 13

The Contracting Parties shall settle by means of negotiations any disputes which may arise between them regarding the implementation and/or interpretation of this Agreement.

Article 14

Amendments to this Agreement shall be made by mutual agreement between the Contracting Parties executed in individual protocols for each amendment.

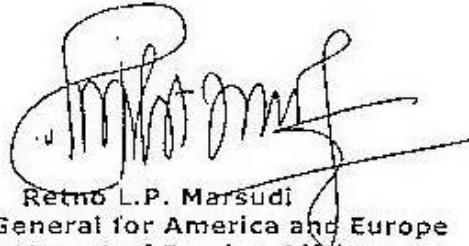
Article 15

1. This Agreement shall enter into force on the date of receiving of the second of the notes with which Contracting Parties notify each other that the internal procedures required for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years, and it shall automatically be extended thereafter for the same period, unless at any time either Contracting Party submits to the other a written notice of its intention to terminate this Agreement 6 (six) months prior to its termination.
3. Each Contracting Party to this Agreement may terminate this Agreement, by means of a written notification to the other Contracting party. The termination shall take effect on the first day of the fourth month following the date on which the notification received by the other Contracting Party.
4. On the date of entry into force of this Agreement, the Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria, signed in Jakarta on January 29th 2004, and the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bulgaria on Economic and Technical Cooperation, signed in Sofia on October 12th, 1990, shall be terminated.
5. The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any on going programs and projects made under this Agreement until the completion of such programs and projects unless the Contracting Parties decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Lombok, Indonesia on this nineteenth day of November in the year two thousand and nine in Indonesian, Bulgarian and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



Retno L.P. Marsudi
Director General for America and Europe
Department of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF BULGARIA



Evgeny Angelov
Deputy Minister of Economy,
Energy and Tourism